

PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH; ANTARA CITA DAN FAKTA

Oleh Farid Setiawan

Peneliti Lentera *Research Institute* Yogyakarta
E-Mail: faik_jpr@yahoo.com/faik.jpr@gmail.com

ABSTRACT

The history of establishment and development of Muhammadiyah educational institution, beside to produce educated elites who are able to be social figure and able to compete western education (Dutch), it is also intended to empower poverty. It is a pity, the rapid development of Muhammadiyah education isn't balanced by professional management. The organizational management tends to be traditional; it couldn't accommodate meaningful penetration for the sake Muhammadiyah's interest. Its fact influenced toward shifting of orientation to fulfill pragmatic and short term needs. Therefore, the leading is needed to avoid Muhammadiyah education from splitting away its idealism and the history of caring poverty.

Keywords: Traditional Islamic Boarding School, Reformation of Muhammadiyah Education

A. Pendahuluan

Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, lahir di bumi nusantara ini bukanlah berangkat dari ruang yang serba kosong. Kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912M/1330H tersebut tentunya di latarbelakangi oleh serangkaian kompleksitas persoalan bangsa. Kejumudan keberagaman serta terpuruknya pendidikan masyarakat Indonesia merupakan beberapa sebab kelahiran Muhammadiyah. Demikian halnya dengan tingginya angka kemiskinan yang menjadikan bangsa ini seolah di pandang sebelah mata oleh pihak kolonialis, Hindia-Belanda.

Adalah Ahmad Dahlan (1869-1923) yang mencoba mengurai benang merah persoalan bangsa tersebut. Berbekal pada kapasitas diri Kiai Dahlan yang di atas rata-rata, mengajak pria kelahiran kampung Kauman Yogyakarta itu turut andil dalam menyembuhkan penyakit bangsanya. Dalam benaknya, obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit tersebut dapat dilakukan melalui reformasi pendidikan. Untuk mewujudkan komitmen terhadap reformasi pendidikan, Kiai Dahlan tidak segan-segan dalam berbuat. Sepanjang hidupnya, suami Nyai Walidah (Nyai Dahlan)

harus rela mewakafkan seluruh pikiran, harta-benda serta tenaganya demi cita-cita mulia dalam membangun masyarakat Islam di Indonesia.

Keberadaan Kiai Dahlan pada masa itu memang dihadapkan dengan segala persoalan masyarakat yang sangat kritis. Corak keberagamaan yang senantiasa “meng-agama-kan budaya” menuntut pria bernama kecil Muhammad Darwisy itu harus bermandi keringat dalam meluruskan keyakinan (aqidah) dan ibadah masyarakat, sebagaimana ajaran Islam yang otentik. Dalam aspek aqidah, masyarakat Indonesia masih terbelenggu dengan segala praktik-praktik kepercayaan terhadap benda-benda keramat, seperti: keris, tombak, batu aji, percaya adanya hari baik dan buruk serta percaya terhadap kesaktian makam para wali. Begitu pula dengan praktik ibadah, masyarakat masih saja menggabungkan ajaran Islam dengan ritual agama Hindu-Budha. Tidak sedikit di antara masyarakat yang menjalankan *selamatan*, mengirim do’a beserta sesajian terhadap leluhur, upacara kematian hingga masa kelahiran. Beberapa aktivitas masyarakat yang demikian tentunya tidak pernah dapat lepas akan peran ulama di dalamnya.

B. Pendidikan Muhammadiyah dalam Lintasan Sejarah

Potret kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas telah menempatkan para ulama sebagai pusat segala aktivitas keagamaan warga. Di samping sebagai seorang alim yang memiliki kharisma dimata masyarakat, ulama juga berperan sebagai tabib (dokter), konsultan magis serta berfungsi pula menjadi guru. Peran ganda atau multi fungsi yang dimiliki oleh ulama acapkali menyebabkan tokoh kharismatik tersebut sulit dijangkau oleh masyarakat awam. Hanya orang-orang tertentu di sekitar ulamalah yang dapat menjadi komunikator dan/atau mediator. Di antara mereka-mereka yang menjadi mediator tersebut tiada lain adalah para santri yang di didik di pesantren tempat para ulama mengabdikan diri.

Pernyataan Abdurrahman Wahid, sebagaimana dikutip oleh Syafii Maarif (1987: 57), telah menegaskan keberadaan ulama di pesantren. Menurutnya, seorang ulama beserta para pembantunya merupakan satu-satunya hierarki kekuasaan yang sangat

diakui di pesantren. Kekuasaan ulama bersifat mutlak atas santrinya. Sehingga para santri merasa terikat dengan ulama sepanjang hidupnya, setidak-tidaknya sebagai sumber ilham dan bantuan moral bagi kehidupan perorangan. Bahkan, ulama seringkali dianggap sebagai sosok yang *ma'shum* (tanpa salah).

Kategori ulama tersebut, menurut Kuntowijoyo (2001: 36), hanya terjadi pada masa pra-industrial (zaman klasik/zaman pra kemerdekaan). Dalam buku "*Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*", Kuntowijoyo menuturkan bahwa hubungan santri dengan ulama terjalin sangat kuat. Model komunikasi timbal-balik antara santri dengan ulama hanya berjalan melalui oral (lisan). Sesekali, ulama tidak segan-segan untuk datang apabila diundang mantan santrinya. Sebaliknya, para santri dan/atau mantan santri menjadi wajib hukumnya untuk *sowan* kehadiran ulama. Kedekatan interaksi kultural itu muncul sebagai akibat dari perjalanan waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di pesantren.

Memasuki abad ke dua puluh, keberadaan pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang cukup diminati banyak orang. Model pembelajaran klasikal dengan inti materi yang menekankan pembahasan kitab-kitab klasik, menarik keterpesonaan masyarakat untuk masuk di pesantren. Hal itu disebabkan karena tingkat penguasaan kitab-kitab klasik pada masa itu merupakan suatu ukuran bagi tinggi rendahnya pemahaman keagamaan seseorang. Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat di golongkan menjadi delapan kelompok, seperti: *nahwu/sharaf, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, tauhid, tasawuf* dan etika, serta beberapa cabang ilmu lain semisal *tarikh* dan *balaghah*. Secara umum, tempat pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan di pesantren itu berada di masjid-masjid, surau dan/atau tempat tinggal para ulama.

Meskipun diminati banyak orang, akan tetapi, sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren dimasa klasik belumlah mengenal kurikulum dan ijazah. Lamanya seseorang "*nyantri*" dapat dilihat dari kecenderungan pemahaman tentang kitab-kitab klasik yang dikuasainya. Hal inilah yang menjadikan predikat seseorang

sebagai alumnus pesantren tidak dapat diukur melalui hitungan waktu. Di samping itu, seragam wajib yang selalu dikenakan oleh para santri tiada lain berupa sarung dan peci. Di pesantren klasik, proses pelaksanaan belajar mengajarnya dilakukan dengan model melingkar, dimana para peserta didik mengelilingi ulama.

Kategori santri di pesantren juga memiliki istilah-istilah yang cukup variatif. Di lingkungan pesantren terdapat sebuah pameo santri *gudhiken* (baca: terserang penyakit gatal). Predikat semacam itu di berikan kepada semua peserta didik sebagai prasyarat “diakuinya” yang bersangkutan sebagai seorang santri. Dalam makna lain, seseorang belum dikatakan sebagai santri apabila tidak terserang penyakit *gudhiken* terlebih dahulu. Gejala keberadaan santri *gudhiken* tersebut menandakan adanya potret kehidupan pesantren klasik yang serba kumuh dan kotor.

Ditinjau dari aspek bermukimnya, keberadaan santri di sebuah pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Menurut Haidar Putra Daulay (2007: 64), jenis-jenis santri di pesantren terdiri dari, santri mukim dan santri *kalong*. Jenis pertama menggambarkan kondisi seorang santri yang tempat tinggalnya berasal dari luar lingkungan pesantren, sehingga mereka harus bermukim (mondok) selama *nyantri*. Sementara, jenis kedua adalah para santri yang tempat tinggalnya berada di lingkungan pesantren. Kedekatan jarak antara rumah dengan pesantren acapkali menjadikan para santri hilir-mudik dari rumah ke pesantren. Sesekali santri akan datang ke pesantren selama ada jadwal-jadwal tertentu dalam belajar, setelah itu akan kembali lagi ke rumah.

Bagaimanapun juga, pondok pesantren pada awal abad keduapuluh telah memberi kontribusi luar biasa terkait dengan persebaran Islam di Indonesia. Sekalipun hingga saat sekarang, banyak sejarawan yang belum menemukan titik awal kelahiran pesantren. Namun, aspek pembelajaran yang menekankan pendekatan hafalan kitab-kitab klasik berdampak pada tingginya ketaatan peserta didik terhadap agama Islam. Ketaatan terhadap ajaran Islam serta upaya menjunjung tinggi Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia itu kadangkala diperlakukan secara berlebihan.

Sebagai bukti ketaatan sekaligus menjunjung tinggi kitabullah, Al-Qur'an, para santri seringkali berjalan sambil *menyunggi* (baca: memikul) kitab suci di atas kepala. Hal itu biasanya berlangsung pada saat para santri hendak berangkat ke pesantren untuk menuntut ilmu. Kendati demikian, banyak sejarawan yang menyebutkan bahwa lingkungan pesantren-pesantren klasik juga dapat dimaknai sebagai penyumbang terbesar kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat.

Kondisi kehidupan pendidikan di pesantren itulah yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dipelajari di sekolah-sekolah kolonial Hindia-Belanda. Disaat para santri di pesantren tengah mendalami ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab-kitab klasik, para siswa didikan sekolah Hindia-Belanda telah memperdalam pengetahuan umum lainnya. Kondisi umat yang demikian tentunya menjadi sangat sulit bagi warga bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan kolonialisme. Sebab tidaklah mungkin senjata meriam dapat dikalahkan dengan cara memberikan sesajian pada kuburan-kuburan para wali. Demikian juga tidaklah mungkin umat Islam dapat menguasai bangsa ini kembali dengan cara berzikir di atas sajadah dari pagi hingga petang. Sementara, para peserta didik keluaran sekolah Belanda telah menguasai ilmu-ilmu modern, seperti; matematika, fisika, kimia, kedokteran, sosiologi, politik, biologi, teknologi dll.

Kultur pendidikan tradisional (pesantren) yang membelenggu sebagian besar masyarakat Indonesia itulah yang hendak dibongkar oleh Kiai Dahlan. Paradigma mengenai reformasi pendidikan Islam tersebut tentunya dibidikkan dalam rangka mengembalikan kemampuan daya saing dan daya sanding pendidikan umat Islam untuk mengimbangi produk (siswa) sekolah kolonial Belanda. Sehubungan dengan itu, gagasan Soebardi dan Lee, yang dikutip oleh Achmad Jainuri (1990: 43) telah menjelaskan secara lugas perihal lembaga pendidikan Muhammadiyah. Menurutnya, Kiai Dahlan sangat berkeinginan untuk mencetak "elit" muslim terdidik yang memiliki identitas Islam yang kuat sehingga mampu memberikan bimbingan dan keteladanan terhadap masyarakat, dan juga sekaligus sebagai kekuatan untuk

mengimbangi tantangan kaum elit sekuler berpendidikan Barat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Belanda.

Berangkat dari keinginan tersebut di atas, Kiai Dahlan mencoba menerobos sekat-sekat budaya masyarakat melalui penggabungan ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum (integrasi ilmu pengetahuan) di dalam dunia pendidikan Islam. Sulit dibayangkan bagaimana kegigihan Kiai Dahlan pada masa itu untuk menghilangkan dikotomisasi (pembedaan) antara ilmu agama dengan ilmu umum dimata masyarakat awam. Keyakinan yang terpatri cukup kuat untuk membangkitkan kesadaran warga-bangsa, menjadikan Kiai Dahlan melakukan ijtihad pendidikan dengan mengambil sisi positif dari pendidikan yang digunakan oleh pihak Barat, kolonial Hindia Belanda.

Yusron Asrofi (2005:73-74), mengungkapkan bahwa pada tahun 1912 Kiai Dahlan mendirikan sekolah bernama *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiah*. Dan pada tahun 1918 Beliau mendirikan Sekolah Menengah yang diberi nama *Qismu Arqa* dan bertempat di rumahnya sendiri. Jelang beberapa waktu, tepatnya tahun 1920, sekolah tersebut berubah menjadi pondok Muhammadiyah. Sekolah ini mencoba mengambil sistem pendidikan Barat yang dianggap relevan, yang waktu itu sangat dibenci oleh para ulama kolot. Dalam kurikulum pengajarannya, di samping di berikan mata pelajaran dari kitab-kitab para ulama klasik, juga diberikan ilmu pengetahuan karya pemikir dan ulama-ulama modern. Demikian halnya dengan tata ruang yang digunakan Kiai Dahlan. Sekolah tersebut berada di sebuah ruang tamu rumahnya dan telah menggunakan meja, bangku, serta papan tulis. Sedangkan, dalam proses pembelajarannya, para siswa telah diajarkan menyanyi *do re mi fa sol*.

Langkah Kiai Dahlan dalam melakukan reformasi pendidikan, sebagaimana pola pendidikan modern, memunculkan sejumlah kritikan dari para ulama tradisional. Pada masa itu, Kiai Dahlan telah dituduh oleh banyak ulama sebagai orang yang murtad dan menjadi Kristen. Namun, tetap saja kritikan-kritikan dari para ulama tersebut tidak dihiraukannya. Komitmennya untuk mengembangkan integrasi ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama dalam dunia pendidikan semakin

membuatnya yakin bahwa reformasi pendidikan adalah pilihan tepat dan obat paling mujarab dalam menyadarkan umat Islam masa itu.

Ijtihad pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan tersebut merupakan buah dari hasil perenungan cukup panjang yang didasari oleh kemampuannya dalam melakukan interpretasi teks-teks agama (Islam) atas kebutuhan masyarakat. Kontekstualisasi teks sebagaimana kebutuhan pendidikan masyarakat merupakan salah satu kategori yang menandakan bahwa spiritualitas agama harus sesuai dengan kondisi sosial yang sedang berkembang. Dengan demikian, Islam menjadi agama yang berkemajuan dan sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Abdul Munir Mulkhan (2007: 2) mengungkapkan bahwa model interpretasi ajaran Islam lewat jalur pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan terdiri dari empat cara, *pertama* memberikan pengajaran (pembelajaran) agama Islam kepada murid-murid di sekolah Gubernemant dan swasta lain. *Kedua*, menyelenggarakan sekolah sendiri. *Ketiga*, memberikan pendidikan tentang cara hidup muslim kepada anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, dan anak-anak nakal melalui lembaga *Fathul Asror Miftahus Sa'adah*. *Keempat*, memberi pengajaran Islam kepada masyarakat umum melalui guru keliling (*muballigh*) dan guru desa.

Tujuan dari apa yang telah dikerjakan oleh Kiai Dahlan tersebut tiada lain adalah mengadakan proses pembelajaran (*transfer of learning*), pengembangan pengetahuan (*transfer of knowledge*), pengalihan nilai (*transfer of values*), serta pengalihan prinsip-prinsip (*transfer of principles*) Islam demi terwujudnya tatanan masyarakat yang sebenar-benarnya, atau masyarakat madani (*civil society*). Semua kegiatan-kegiatan pembelajaran itu difungsikan sebagai prasyarat dalam membangun kearifan diri (*self wisdom*) peserta didik.

Kearifan diri (*self wisdom*) peserta didik dapat tercipta dengan baik apabila di dalam naluri dan pribadinya tertanam kuat akan mentalitas Al-Qur'an. Terkait dengan hal itu, Ahmad Syafii Maarif (1997: 37) mengungkapkan apabila mentalitas yang dibentuk oleh Al-Qur'an adalah mental orang-orang yang merdeka, bukannya mental manusia yang seolah-olah merdeka. Dalam pemahaman demikian, muncul kesan

adanya kemauan serta tuntutan kuat agar peserta didik dapat menjadi diri sendiri serta tidak takut dengan semua makhluk hidup, misalnya pejabat dan/atau atasan sekalipun. Peserta didik bermental demikian itu hanyalah takut pada Allah s.w.t., sebagaimana ketentuan dari ajaran tauhid. Karenanya, tipe peserta didik yang dikehendaki Al-Qur'an tersebut adalah mereka yang *full human*, bukan *sub-human*. Dalam rangka pencapaian tujuan yang dimaksud maka lembaga pendidikan (Muhammadiyah) perlu melakukan tajdid pendidikan.

Tajdid pendidikan tersebut merupakan suatu upaya peneguhan prinsip dan identitas pendidikan Muhammadiyah dalam menghadapi kecenderungan dunia global. Kita perlu menyadari bahwa kondisi masyarakat sekarang ini sedang mengarah pada narasi kehidupan manusia yang mengunggulkan budaya simbolik. Menanggapi hal itu, banyak para pengamat yang telah mengklasifikasikan bahwa kehidupan manusia zaman sekarang adalah pertanda bagi munculnya masyarakat simbolik.

Konfigurasi politik dunia, sebagaimana dilansir oleh Samuel Huntington (2004: 4) menyebutkan bahwa tahun-tahun setelah berakhirnya perang dingin (1990an) merupakan saksi sejarah bagi dimulainya perubahan-perubahan identitas dan simbol-simbol secara dramatis. Hampir sebagian besar manusia di dunia bersembunyi dibalik keunggulan simbol dan budaya masing-masing. Oleh sebab itu, penting kiranya lembaga pendidikan Muhammadiyah dapat mengedepankan aspek simbolitas sebagai salah satu daya tawar (*bargaining*) dan daya tarik terhadap masyarakat. Simbol dan budaya lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebut sesungguhnya berada pada konsep tajdid pendidikan yang diwujudkan melalui mata pelajaran pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA).

C. Potret Pendidikan Muhammadiyah Masa Kini

Tajdid pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Noeng Muhadjir (2005: 133), adalah sebuah prinsip untuk menggabungkan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama. Dalam makna lain, proses pemberdayaan masyarakat Islam pada era

sekarang ini dapat diartikulasikan melalui komitmen untuk menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang diberi ruh spiritualitas Islam. Tajdid pendidikan yang demikian itu memiliki landasan filosofis cukup kuat, dimana, Islam merupakan induknya ilmu empirik-eksperimental serta induknya teknologi. Model integrasi pendidikan umum dengan pendidikan agama merupakan tolok ukur bagi terciptanya peserta didik yang memiliki ketahanan mental dan spiritual sebagaimana konsep manusia Al-Qur'an di atas. Pada titik ini juga dapat dimaknai bahwa konsep reformasi pendidikan yang didengungkan oleh Kiai Dahlan masih cukup relevan hingga saat sekarang.

Semangat yang didasarkan pada modus pencerahan tersebut selanjutnya menjadi geneologi makin merebaknya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di pelbagai pelosok nusantara, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Mohamad Sobary (2000: 78-79) menegaskan bahwa "kejayaan Muhammadiyah" masa lalu sangat di dukung oleh alasan yang cukup jelas, dimana pada masa itu Muhammadiyah bersinggungan dengan kondisi masyarakat yang porak-poranda dari segi ekonomi, lebih-lebih disaat kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan di pelbagai bidang (yang digarap Muhammadiyah) sangat terbatas.

Secara kuantitas, data yang dihimpun oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sedikit banyak dapat membuka kesadaran kita semua akan pesatnya laju pertumbuhan AUM dalam bidang pendidikan dari tahun 2000 hingga 2005. Data yang dihimpun melalui "Profil Muhammadiyah" (2005) itu menyebutkan peningkatan amal usaha pendidikan Muhammadiyah sebagaimana berikut:

No	Amal Usaha Muhammadiyah	Data Tahun	
		2000	2005
1	Sekolah Dasar (SD)	1128	1132
2	Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD)	1768	1769
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1179	1184
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	534	534
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	509	511
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	249	263

7	Madrasah Aliyah (MA)	171	172
8	Akademi	45	55
9	Politeknik	3	4
10	Sekolah Tinggi	52	70
11	Universitas	32	36

Data primer mengenai pendidikan di atas semakin menguatkan asumsi kita akan khasanah intelektual serta partisipasi Muhammadiyah dalam memberdayakan serta mencerahkan atmosfer berfikir anak bangsa. Sehingga wajar apabila Sobary mengungkapkan bahwa AUM pendidikan yang menjulang tinggi telah menjadikan persyarikatan ini semakin *mentereng*, dibandingkan organisasi sosial-keagamaan manapun. Berangkat dari kuatnya asumsi tersebut Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif (2005: 32), dalam setiap pertemuan menyebutkan bahwa Muhammadiyah telah memiliki kekayaan amal-usaha terbesar di dunia.

Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang usianya lebih tua dari negeri ini, Muhammadiyah meniscayakan diri untuk menghindari dari segala macam kritik. Pelbagai kritik terhadap Muhammadiyah, baik internal maupun eksternal, tersebut sejatinya merupakan bagian dari rasa perhatian orang tertentu akan masa depan yang harus dilakukan oleh persyarikatan.

Dalam salah satu artikelnya di buku “Muhammadiyah Digugat; Reposisi Ditengah Indonesia Yang Berubah” (2005), Mohamad Sobary menuturkan bahwa gerakan Muhammadiyah sudah mandek. Kemadegan gerakan Muhammadiyah itu disebabkan karena adanya iklim perubahan sosial yang berkembang semakin cepat, sementara persyarikatan dalam keadaan terseok-seok untuk mengejar dan menangkap proses perubahan tersebut. Muhammadiyah belum mampu mengimbangi laju percepatan perubahan zaman dengan pelbagai macam tawaran dari lembaga sosial lainnya.

Di samping itu, apabila ditinjau melalui aspek birokrasi, Muhammadiyah belum mampu mengakomodasi laju perkembangan zaman. Model birokrasi yang masih digunakan oleh Muhammadiyah saat sekarang merupakan hasil pengadopsian konsep birokrasi Max Weber pada pertengahan abad XIX yang lampau. Dengan pola

birokrasi yang cenderung tradisional, tentunya menjadi sulit apabila Muhammadiyah dapat melakukan terobosan yang berarti dalam membaca gerak percepatan perubahan.

Pendekatan birokrasi yang cukup kaku dan ditunjang dengan rutinitas rapat yang belum mengunggulkan aspek profesionalitas telah menjebak Muhammadiyah dalam menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni. Begitu pula halnya dengan lemahnya visi sebagian pimpinan yang menjadi sebab atas kekurangmampuan Muhammadiyah dalam mengendalikan dan membimbing AUM, khususnya bidang pendidikan. Beban sosial dan kesejarahan dalam membina lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah telah menjadikannya sulit untuk bergerak. Banyak pihak menyebutkan bahwa kondisi Muhammadiyah yang demikian itu sama halnya dengan “gajah bengkak” dan sulit bergerak.

Gedung-gedung seperti sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi yang selalu dimaknai sebagai sumber kekuatan dan keberhasilan Muhammadiyah semakin lama menjadi tergerus oleh banyaknya persaingan dalam bidang yang sama. Pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya sedikit banyak telah “menyalip” gerakan Muhammadiyah melalui pelbagai macam amal usahanya. Dalam konteks ini, kemandirian dan pembaharuan Muhammadiyah sebagai gerakan modern patut untuk ditinjau kembali.

Lemahnya daya kontrol persyarikatan terhadap segenap lembaga pendidikan yang dikelolanya itu sedikit banyak telah berpengaruh pada orientasi yang hendak dicapai oleh sekolah dan madrasah Muhammadiyah. Visi dan misi lembaga pendidikan yang seharusnya berkiblat untuk mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah justru beralih fungsi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pragmatis. Begitu pula halnya dengan spirit teologi *Al-Ma'un* yang menjadi inspirasi Muhammadiyah dalam memberdayakan fakir miskin seolah hanya tinggal kenangan masa lalu. Beberapa indikasi yang disebutkan merupakan titik tolak bagi pergeseran orientasi pendidikan Muhammadiyah akhir-akhir ini.

Memang, keunggulan kuantitas yang tidak ditunjang oleh pembaruan kualitas mengajak sebagian lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai terjerumus dalam pemberlakuan sistem mekanisme pasar. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan cenderung berorientasi pada wilayah profit (keuntungan). Oleh sebab itu, menjadi wajar apabila sebagian lembaga pendidikan Muhammadiyah saat sekarang sangat sulit dijangkau oleh kelompok-kelompok kurang mampu (*mustadl'afin*). Himpitan tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin tak terbendung mengakibatkan banyak dari kalangan mereka yang enggan untuk menjenguk, atau bahkan memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang favorit.

Terkait dengan hal itu, Syafii Maarif dalam pengantar buku “Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah” (2005: xi-xii) mengungkapkan bahwa masih cukup banyak lembaga pendidikan Muhammadiyah yang biayanya cukup mahal. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah berjalan tidak semestinya, sebagaimana Muhammadiyah masa awal yang berpihak kepada fakir miskin. Orientasi paling besar yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah sekarang justru untuk mengejar jumlah, bukannya kualitas.

Sulit dibayangkan apabila dibeberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah favorit di Yogyakarta menetapkan biaya pendidikan selama 6 bulan yang jauh melebihi pendapatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Bagaimana mungkin, anak seorang penjual jamu gendong, tukang becak, kuli pasar maupun buruh tani yang memiliki pendapatan perhari sekitar Rp. 10.000,00-20.000,00 mampu mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah yang biaya masuknya saja mencapai jutaan rupiah (Deni, 2005: 9-10). Apakah hanya karena faktor ekonomi masyarakat yang kurang beruntung, sehingga anak-anak mereka yang sesungguhnya memiliki kadar kualitas mumpuni tidak dapat menikmati sekolah Muhammadiyah yang favorit? Apabila kita berparadigma pro modal, tentu akan menyarankan agar anak-anak tersebut dapat dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah lainnya yang dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi mereka.

Kebijakan pendidikan yang berorientasi profit merupakan perkembangan dari salah satu produk masyarakat modern (modernisasi). Menurut Mansour Fakih (1995: 85), modernisasi pada dasarnya adalah suatu gagasan mengenai proses perkembangan masyarakat yang dibangun atas asumsi terjadinya percepatan dari kehidupan tradisional menuju masyarakat modern, sebagaimana yang telah dirintis oleh bangsa Barat (abad XX) pada saat mereka berkembang. Dalam konteks ini, W.W Rostow (1960), yang juga dikutip oleh Mansour Faqih, menegaskan bahwa pada masa terjadinya percepatan tahapan tersebut muncul adanya satu *metaphora* baru yang bernama pertumbuhan (*growth*) masyarakat, yang selanjutnya dikenal dengan istilah pembangunanisme. Paradigma pembangunanisme yang diketengahkan oleh Rostow memiliki pokok perhatian terhadap akumulasi kapital (investasi modal dan perdagangan).

Melalui paradigma pembangunanisme, hegemoni modal diselubungkan secara halus keseluruh tatanan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dana bantuan pendidikan, para teknokrat serta universitas-universitas di negara dunia ketiga merupakan sarana penting bagi pemberlakuan konsep pembangunan tersebut. Karenanya, pembangunanisme merupakan bungkus atau wajah baru (tangan panjang) dari ideologi kapitalisme. Hanya dengan cara membungkus isu melalui opini tersebutlah ideologi kapitalis dapat diterima oleh masyarakat di negara-negara berkembang.

Dalam kaca mata psikologis, kapitalisme memandang bahwa munculnya sejumlah kemiskinan bukanlah diakibatkan oleh keberadaan sebuah sistem sosial yang kapitalistik, melainkan karena faktor manusianya sendiri yang lemah dalam mengikuti leju perkembangan masyarakat. Berdasarkan konsepsi yang demikian, maka orientasi perkembangan ideologi kapitalis lebih ditujukan untuk merombak mentalitas manusia menjadi sosok yang dapat bersaing dengan para kompetitor lainnya. Keadaan semacam ini pula yang kemudian mengajak sebagian manusia untuk melakukan bunuh diri terhadap nilai-nilai humanitas yang dimilikinya.

Proses perombakan mentalitas manusia tersebut hanya dapat dilakukan melalui pola pendidikan yang intensif. Ketika dunia pendidikan mengalami pergeseran fungsi dan peran, sebagai akibat dari campurtangan modal, maka semangat untuk mendidik manusia-manusia unggul menjadi semakin sirna. Ekspansi besar-besaran kaum kapitalis dalam dunia pendidikan menyebabkan bangunan perumahan di lembaga yang mencetak mentalitas dan karakter manusia itu bergeser menjadi mesin citraan kapitalisme.

Terkait dengan hal itu, Yasraf Amir Piliang (2004: 237) menyatakan bahwa dunia pendidikan yang sejatinya dibangun berdasarkan nilai-nilai obyektifitas, keilmiahan (*scientific*) dan kebijaksanaan (*virtue*), kini telah dimuati oleh nilai-nilai komersial, sebagai refleksi dari keberpihakan pada kekuasaan kapital. Dalam kontek ini, gagasan hegemoni yang pernah dilontarkan oleh Antonio Gramsci dalam *Selections From Notes Books* (1987) dan Michel Foucault dalam *Power/Knowledge* (1972-1977) bukan semata-mata menjelaskan mengenai pola dominasi politik melalui kekuatan struktur (*power*), melainkan juga lewat jalur kultural, yakni kuasa kepemimpinan intelektual (pengetahuan). Dominasi intelektual yang sarat dengan muatan paradigma kapitalistik itu disebarluaskan melalui bentuk-bentuk intuisi dan juga lembaga pendidikan.

D. Penutup

Bagaimanapun juga, penulis meyakini, bahwa setiap lembaga pendidikan membutuhkan biaya operasional yang tak kunjung sedikit. Setiap kali inovasi muncul, pastilah membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, yang menjadi persoalan apabila upaya untuk menutup kebutuhan-kebutuhan tersebut lantas harus ditempuh lewat upaya menggadaikan idealisme sebagai sebuah lembaga yang mendidik anak bangsa.

Paradigma pendidikan global saat sekarang memang mengandung sejumlah kesenjangan sosial. Hanya orang berlatar belakang ekonomi kaya (*the haves*), yang layak mendapatkan layanan pendidikan bermutu. Sementara, mereka yang secara

kebetulan kurang beruntung dan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi hanya dapat mengakses dunia pendidikan *ala* kadarnya. Disparitas sosial dalam dunia pendidikan di atas patut untuk dihilangkan dalam benak pengelola pendidikan Muhammadiyah. Paradigma baru (*new paradigm*) yang dapat diadopsi adalah memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada peserta didik yang cerdas secara intelektual maupun emosional meskipun lemah secara ekonomi, dibandingkan kepada mereka yang kaya dengan kapasitas intelektual dan kepekaan yang rendah.

Oleh karenanya, tiga gagasan pendidikan di era global sebagaimana diungkapkan oleh Zamroni (2005: 159) sangat layak untuk kita cermati bersama. Menurutnya, dalam mengantisipasi persoalan di atas pengelola pendidikan khususnya sekolah/madrasah Muhammadiyah patut mengembangkan kebijakan-kebijakan yang diantaranya, *pertama*, mempersempit ketimpangan pendidikan, baik melalui sisi geografis maupun strata sosial. *Kedua*, mengembangkan pendidikan yang manusiawi (humanis) untuk tujuan pengembangan individu paripurna serta kelompok sosial yang kokoh dan kuat. *Ketiga*, mengembangkan pendidikan multikultural agar pelayanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Dalam konteks ini, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tiga kebijaksanaan dalam mengelola lembaga pendidikan di atas tentunya sangat sarat dengan apa yang dihendaki oleh *founding father* Muhammadiyah, Kiai Dahlan. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengimplementasikan tiga gagasan di atas dengan seksama. Sehingga, Kiai Dahlan diliang kubur dapat lagi tersenyum melihat hasil keringat dan cita-citanya untuk mencerdaskan anak bangsa mampu diteruskan para generasi Muhammadiyah yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofie, M Yusron. 2005. *Kiai Haji Ahmad Dahlan; Pemikiran dan Kepemimpinannya*. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah
- Asyari, Deni. 2005. *Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah*. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: Resist Book
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cetakan: Pertama. Jakarta: Kencana
- Faqih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cetakan: Kedua. Yogyakarta: Insist Press
- Huntington, Samuel. 2004. *Benturan Antar Peradaban dan Masa depan Politik Dunia*. Cetakan: Kedelapan. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Jainuri, Achmad. 1990. dalam Syamsuddin, Din (ed). *Muhammadiyah; Kini dan Esok*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Cetakan: Kedua. Bandung: Mizan Media Utama
- Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Cetakan: Kedua. Jakarta: LP3ES
- _____. 1997. *Islam; Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhadjir, Noeng. 2005. dalam Nasir, M. Syafar dkk. (peny). *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah Kerjasama dengan UAD Press
- Mulkhan, Abdul Munir. Makalah. *Etos Guru-Murid dalam Pendidikan AIK yang disampaikan dalam acara Lokakarya Pengembangan Sistem Pendidikan Muhammadiyah serta Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah*. Jakarta: Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 12-14 Januari 2007
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: Jalasutra
- Sobary, Mohamad. 2000. dalam Tanthowi, Pramono U, dkk. (ed). *Muhammadiyah Digugat; Reposisi Ditengah Indonesia Yang Berubah*. Cetakan: Pertama. Jakarta: Kompas
- Zamroni. 2005. dalam Nasir, M. Syafar. dkk. (peny). *Tajdid Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradaban*. Cetakan: Pertama. Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah Kerjasama dengan UAD Press